

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164 TAHUN 2021

TENTANG
TIM SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN
2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SEBAGAI TINDAK LANJUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR
12 TAHUN 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, perlu dilaksanakan sosialisasi kepada publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERATURAN LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SEBAGAI TINDAK LANJUT PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021.

- KESATU : Menetapkan Tim Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. menyusun rencana kerja kegiatan;
 2. melaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya;
 3. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait; dan
 4. melaporkan hasil kegiatan sosialisasi kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Desember 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021, DIPA/DPA Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dan/atau anggaran kegiatan Instansi/Institusi lainnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2021
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
3. Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi;
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
7. Inspektur;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAN PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI
TINDAK LANJUT PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021

NOMOR : 164 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERATURAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI TINDAK
LANJUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Pengarah	: 1. Roni Dwi Susanto 2. Robin Asad Suryo 3. Sarah Sadiqa 4. Gatot Pambudhi Poetranto 5. Sutan Suangkupon Lubis 6. Setya Budi Arijanta
2	Ketua	: Emin Adhy Muhaemin
3	Anggota	: 1. Dewi Chomistriana, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
		<ol style="list-style-type: none">2. Putut Marhayudi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat3. Hermawan4. Suharti5. Gusmelinda Rahmi6. Dwi Wahyuni Kartianingsih7. Fadli Arif8. Yulianto Prihhandoyo9. Patria Susantosa10. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty11. R. Fendy Dharma Saputra12. Muhammad Aris Supriyanto13. Iwan Herniwan14. Jhon Piter Halomoan Situmorang15. Tatang Rustandar16. Raden Ari Widiyanto17. Antonius Lambok Sihombing18. Ari Sulindra19. Arif Budiman Anwar20. Arif Rachman21. Dwi Satrianto22. Edi Kristiyanto23. Eko Rinaldo Octavianus24. Fajar Adi Hemawan25. Hardi Afriansyah26. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya27. Heldi Yudiyatna28. Ichwan Makmur Nasution29. Januar Indra30. Muhammad Firdaus31. Mustika Rosalina Putri32. Ria Agustina Nasution33. Rinaldi Morintosh

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
		34. Rusli Maryadi 35. Selamat Budiharto 36. Setio Widodo 37. Theodore Sutarto 38. Tjipto Prasetyo Nugroho 39. Windy Dian Trisari 40. Yuyu Yulianti 41. Zulhenny 42. Ade Rizky Emirsyah 43. Adreng Kusuma Ayuningtyas 44. Agita Marelia Ulfa 45. Anastasia Citra Puspita 46. Anatasia 47. Andri Priyo Utomo 48. Andy Martanto 49. Anita Carollin 50. Biantri Raynasari 51. Dara Kumala Arumbuana 52. Deasy Rachmawati 53. Dian Rahmayanti 54. Ermawanto 55. Ermawati Septianingtyas 56. Febri Kamalisa Rachman 57. Firmansyah 58. Gigih Pribadi 59. Hestri Rokayah 60. Ilvia Restu Utami 61. Imam Arumsyah 62. Inamawati Mastuti Dewi 63. Lailatul Mufarokhah 64. Linda Mikowati 65. Mira Erviana 66. Mochammad Andhika Rangga L. 67. Nuraini Darmastuti

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
		68. Octo Army 69. Rakhma Kusuma Wardhani 70. Rasmita Juliana Sitepu 71. Rini Handriyani 72. Rizky Arimawati 73. Rovazio Okiiza 74. Sari Melani 75. Seno Haryo Wibowo 76. Sri Aditya Nur Pratama 77. Sugianto 78. Thanthawi Jauhari 79. Tri Susanto 80. Umi Nurnaeni 81. Vina Da'watul Aropah 82. Wening Dyah Capriani Hapsari D. 83. Widya Prima Sari Fultanegara 84. Yohana Surat Payon Philips 85. Andi Darmawan 86. Andi Rannualdi 87. Andy Purwa Sejati 88. Annisa Putri 89. Ardian Hoppin Sitompul 90. Asih Riska Nurmasari 91. Benny Leopold Dumais 92. Beta Romadiyanti 93. Budi Bowo Laksono 94. Cherish Shery Desarya 95. Eva Sinaga 96. Yasmine Permata Sari 97. Yosi Febriani 98. Indro Pantja Pramodo, Kepala Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
		99. Agus Pudjijono, Kepala Subdirektorat Sistem Pengadaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 100. Fani Dhuha, Kepala Seksi Standar dan Pedoman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 101. Muhammad Zulfikar Ali, Kepala Subdirektorat Percepatan Infrastruktur, Sekretariat Kabinet 102. Agus Arif Rachman, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO